

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2008. *Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- , 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan ke-2, Bandung: Rafika Aditama,
- , 2014. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adiwinata, Saleh, 1980. *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-undang Pokok Agraris*, cet. 2, Bandung : Mumni.
- Agustina, Rosa., *et. al., eds.*, 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)* Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman, 2020. *Pemeliharaan Data Pendaftaran tanah*, Yogyakarta: STPN Press.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Anwar, H.A.K.Moch., 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Alumni.
- Atmasasmita, Romli, 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Fuady, Munir, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1, Jakrta: Citra Aditya Bakti.
- H.R., Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.

- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005. *Pengantar hukum Administrasi Indonesia, Introduction to Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi, 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi, 1997. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- , 2013. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. Jilid 1.
- Ibrahim, Johny, 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 2, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indroharto, 1996. *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Luqman, Loebby, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Jakarta: Datacom.
- Mamudji, Sri, 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 123.
- , 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

- , 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Salsa, Shidqi Noer, 2020. *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia dan Belanda*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Santoso, Urip, 2009. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-5, Jakarta: Kencana.
- , 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, edisi pertama, Jakarta: Kencana.
- , 2019. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-6, Jakarta: Kencana.
- Setiawan, Rachmat, 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Sianturi, S.R., S.H., 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sihombing, B.F., 2019. *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana, Edisi Pertama.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- , 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soesilo, R., 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Subekti R., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet 21, Jakarta: Intermasa.

Syamsudin, M., 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, 2020. *Memahami Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.

Widjaja, A.W., 1999. *Etika Administrasi Negara*, Cetakan ke-2, Jakarta: Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta tanah.

C. Makalah, Artikel, Internet

Bustami, Ganis Syahputra R., *“Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Terhadap Penumpang (Studi Kasus Herlina Julita Tampubolon Melawan PT. Blue Bird & Dany Sulistyono)”*, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2015).

Sari, Masnah., *“Kewajiban PPAT Untuk Merahasiakan Isi Akta-akta Dalam kaitannya Dengan Hak Ingkar Yang Diberikan oleh Undang-undang Guna Melindungi Kepentingan Masyarakat Umum.”* (Makalah disampaikan dalam rangka pembekalan PPAT dalam menghadapi perkara-perkara pidana, perdata yang berkaitan dengan rahasia jabatan, (Depok: 7 September 2002).

Aulina, Laurences & Kenny Wiston., *Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana.* <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>

Biro Humas Kementrian ATR/BPN, *PPAT diminta terus pastikan perkembangan terkait pendaftaran tanah*”, <https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/content/details?key=implementasi-pp-18%2F2021%2C-ppat-diminta-terus-pastikan-perkembangan-terkait-pendaftaran-tanah>.

Nugroho, Rage Cikal,. *Meluruskan Persepsi Notaris dan PPAT*,
<https://ini.id/post/Meluruskan%20Persepsi%20Notaris%20dan%20PPAT>.

Ponglabba, Chant S.R., *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, 6 Agustus 2017,
<https://media.neliti.com/media/publications/147158-ID-tinjauan-yuridis-penyertaan-dalam-tindak.pdf>.

D. Jurnal

Dewi, Yetty Komalasari,. *Liability of Legal Person in Indonesia: A Statutory and Practical Review*, *Indonesia Law Review*, No.1 (November, 2013).

Hoesin, Siti Hajati, *Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 3, 2019.

Sonata, Depri Liber,. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum Fiat Justisial* *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No.1, Januari-Maret 2014.

E. Wawancara

Wawancara Daring dengan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, Bapak Firman S.E. Ramadhan S.H.

Wawancara Daring dengan Notaris dan PPAT Kota Tangerang, Ny. Sulchiah Ulfah, S.H., M.Kn.

Wawancara Daring dengan Notaris Kota/Kab. Bandung Barat dan Pengajar Kenotariatan pada Universitas Pelita Harapan, Ny. Dr. Ely Baharini, S.H., M.H., Sp.N.